

## **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Kebutuhan Hidup Layak terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Kalimantan**

*The Effect of Economic Growth, Inflation and Decent Living Needs on Provincial Minimum Wages in Kalimantan Island*

**Resti Amelia**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Palangka Raya

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebutuhan hidup layak secara parsial dan simultan terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Kalimantan tahun 2010-2019. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda data panel dengan program Eviews. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Kalimantan, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Kalimantan, kebutuhan hidup layak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Kalimantan serta kebutuhan hidup layak menjadi faktor yang paling dominan mempengaruhi upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kebutuhan hidup layak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Kalimantan.

**Kata Kunci : Upah Minimum Provinsi, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Kebutuhan Hidup Layak.**

### **ABSTRACT**

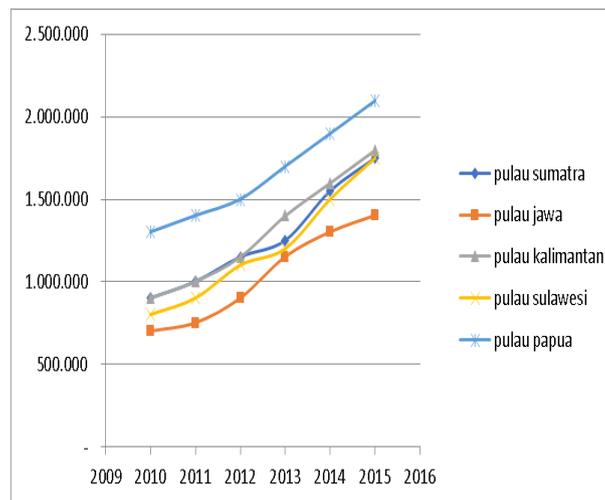
*This study aims to analyze the effect of the variables of economic growth, inflation, decent living needs partially and simultaneously on the Provincial Minimum Wage in Kalimantan Island in 2010-2019. The data in this study uses secondary data sourced from the Indonesian Central Statistics Agency (BPS). The analysis used in this study is multiple linear regression analysis of panel data with the Eviews program. The results of this study indicate that economic growth has a negative and insignificant effect on the Provincial Minimum Wage in Kalimantan Island, inflation has a negative and significant effect on the Provincial Minimum Wage on Kalimantan Island, the need for decent living has a positive and significant effect on the Provincial Minimum Wage on Kalimantan Island and the need for decent living is the most dominant factor influencing the provincial minimum wage on the island of Kalimantan and the results of the study This shows that economic growth, inflation and the need for decent living simultaneously or jointly affect the Provincial Minimum Wage on the island of Kalimantan.*

**Keywords: Provincial Minimum Wage, Economic Growth, Inflation, Needs Living Worth.**

## I. PENDAHULUAN

Tenaga kerja merupakan pemilik faktor produksi yang menawarkan jasa dan mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan proses produksi. Untuk itu, atas pengorbanannya tenaga kerja berhak mendapatkan balas jasa dari perusahaannya berupa penghasilan dalam bentuk upah. Upah merupakan salah satu indikator buruh/karyawan/tenaga kerja. Berbagai macam upaya dilakukan pemerintah Indonesia demi kesejahteraan rakyat. Hal tersebut menjadi tujuan nasional bangsa Indonesia sejak dulu, sebagaimana yang tertera dalam amanat konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, kesejahteraan juga menjadi salah satu tujuan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yaitu tujuan ketiga yang berbunyi : “ Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia “. Tenaga kerja pada dasarnya merupakan pihak yang menawarkan jasa, serta mempunyai peran penting dalam keberlangsungan proses produksi, sehingga tenaga kerja berhak mendapatkan balas jasa dari perusahaan berupa penghasilan yaitu upah. Salah satu pulau besar di Indonesia yang terdapat provinsi dengan Upah Minimum Provinsi yang tidak jauh berbeda secara kasat mata adalah Pulau Kalimantan. Dibandingkan dengan pulau besar lain di Indonesia, provinsi-provinsi yang berada di Pulau Kalimantan memiliki selisih rentang upah minimum provinsi yang lebih kecil. Bahkan empat dari lima provinsi di pulau terbesar di Indonesia tersebut memiliki nilai upah minimum provinsi di atas rata-rata upah minimum Indonesia. Artinya jika dilihat segi kesejahteraan, secara rata-rata penduduk di Pulau Kalimantan sudah lebih sejahtera dibandingkan dengan rata-rata penduduk di Indonesia secara keseluruhan (Yunita, 2019). Pengaturan kenaikan upah

atau penyesuaian UMP yang selama ini berlaku setiap tahun, sebaiknya ditinjau ulang karena terlalu singkat waktunya. Padahal UMP bisa menghabiskan waktu cukup lama, ternyata hanya habis dalam waktu singkat. Hal ini jelas sangat tidak efisien, sehingga peninjauan upah sebaiknya diubah menjadi setiap dua sampai tiga tahun sekali, bukan per satu tahun. Peninjauan upah atau penyesuaian upah secara periodik harus dilakukan karena hal tersebut berhubungan dengan harga pangan, sandang, dan kebutuhan lain, yang harus dibeli oleh pencari nafkah. Jika harga-harga naik, sedangkan upah tidak mengalami kenaikan, maka upah riil akan turun dan tenaga kerja menjadi lebih miskin, yang menyebabkan tenaga kerja tidak mampu untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari (Kertonegoro, 1999). Upah yaitu hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, ataupun peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah maupun akan dilakukan ( Pasal 1 angka 2003 tentang ketenagakerjaan). Dengan adanya peraturan pemerintah No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, maka pemberlakuan upah minimum regional (UMR) berubah menjadi upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum Kabupaten/Kota. Dengan adanya peraturan baru ini, provinsi-provinsi di Indonesia mulai menyesuaikan upah minimum regional di daerah mereka. Berikut gambar nilai upah minimum berdasarkan Pulau di Indonesia tahun 2010-2015 ( Rupiah )



**Gambar 1. Upah Minimum Berdasarkan Pulau di Indonesia tahun 2010-2015 (Rupiah)**  
Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan gambar 1. diatas dapat terlihat bahwa nilai upah minimum yang tinggi berada di Pulau Papua dan Pulau Kalimantan berada pada urutan kedua dari nilai upah minimum yang nilai nya tinggi di Pulau Indonesia, terutama pada provinsi Kalimantan Timur yang nilai upah minimum provinsi memiliki nilai paling tinggi di antara pulau lain yang berada di

Pulau Kalimantan. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah maka kenaikan PDRB dijadikan acuan tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, sebagaimana Tabel 1.2 yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di 4 provinsi di Pulau Kalimantan adalah sebagai berikut .

**Tabel 1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 ( persen) di Pulau Kalimantan tahun 2010-2019**

Tahun	Provinsi			
	Kalimantan Tengah (%)	Kalimantan Selatan (%)	Kalimantan Timur (%)	Kalimantan Barat (%)
2010	6,17	6,45	4,90	5,47
2011	7,01	6,97	6,30	5,98
2012	6,87	5,97	5,26	5,81
2013	7,37	5,33	2,25	6,05
2014	6,21	4,84	1,71	5,03
2015	7,01	3,82	-1,20	4,81
2016	6,35	4,40	-0,38	5,20
2017	6,73	5,28	3,13	5,17
2018	5,61	5,08	2,64	5,06
2019	6,12	4,08	4,74	5,00

Sumber: Badan Pusat Statistik ( BPS ) Indonesia

Lajunya pertumbuhan ekonomi di daerah dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya yang merupakan indikator makro untuk melihat perekonomian secara riil di suatu wilayah. Tabel 1.1 menunjukkan nilai laju pertumbuhan PDRB selama kurun waktu 2010-2019 pertumbuhan ekonomi di pulau Kalimantan didominasi oleh Provinsi Kalimantan Tengah, hal tersebut dapat

dilihat dari nilai laju pertumbuhan ekonominya berada di atas 7,00 %, dan selanjutnya provinsi Kalimantan Selatan yang nilai laju pertumbuhan ekonominya berada di atas 6,00%, kemudian provinsi Kalimantan Barat yang nilai laju pertumbuhan ekonominya berada diatas 6,00 % dan yang paling rendah berada pada provinsi Kalimantan Timur yang nilai laju pertumbuhan ekonominya 6,00 %. Selain di lihat dari pertumbuhan ekonomi (

PDRB ) penetapan nilai upah minimum dapat dilihat dari tingkat kenaikan harga barang secara jangka panjang dan terus-menerus dipasaran yaitu biasa disebut inflasi. Angka kenaikan inflasi di setiap provinsi menjadi tolak ukur menentukan seberapa besar nilai upah minimum disetiap provinsi tersebut yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi setiap daerah.

Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat periode tertentu. Selain itu pertumbuhan ekonomi melalui PDRB yang meningkat, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja diwilayah tersebut, karena dengan kenaikan PDRB kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas hasil produksi dan akan meningkatkan tingkat upah didaerah tersebut. Maka analisis faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang stabil serta kehidupan layak masyarakat semakin baik.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Upah Minimum

Upah minimum merujuk pada standar kelayakan bagi para pekerja. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan upah minimum harus didasarkan KHL. Pasal 1 ayat 1 dari peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 tahun 1999, mendefinisikan upah minimum sebagai “upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap”. Sebagai imbalan dari penguasa kepada pekerja, upah yang diberikan dalam bentuk tunai harus ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan, baik untuk pekerja itu sendiri maupun keluarganya.

### Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Simon Kuznet dalam Djalil (2014) memberikan definisi pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu negara dalam jangka panjang untuk menyediakan jenis barang-barang ekonomi yang semakin banyak kepada penduduknya, yang tumbuh sesuai dengan kemampuan dari kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang dibutuhkan. Menurut Kuncoro (2004) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses pertumbuhan output perkapita yang terjadi dalam jangka panjang dimana terdapat kecenderungan peningkatan output perkapita bersumber dari dalam kegiatan perekonomian tersebut yaitu kemampuan yang berada dalam perekonomian itu sendiri, bukan kemampuan bersifat sementara dan dari luar kegiatan perekonomian tersebut. Proses pertumbuhan itu sendiri akan menimbulkan suatu peningkatan bagi kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode berikutnya.

### Inflasi

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang di jumpai di hampir semua negara di dunia adalah inflasi (Ensiklopedia Indonesia, 1991). Definisi tingkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain (Nanga, 2001).

### Kebutuhan Hidup Layak

Kebutuhan hidup layak (Versi Permenaker 17/VIII/2005) adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan 1 bulan. Acuan

dasar komponen KHL sebagaimana ditentukan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Per-17/Men/VIII/2005 yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan pengeluaran riil buruh. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan keluarga, ketersediaan jenis barang, dan peningkatan kualitas barang.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kuantitatif. Metode kuantitatif disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/*sceintific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah sistematis. Metode ini juga disebut metode *discovery*, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Uma sekaran, 2011).

#### Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari orang lain bukan penyelidikan sendiri. Dengan demikian metode pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini menggunakan metode “*Library Research*” atau Riset Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data melalui data publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah.

#### Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik *analisis regresi linier berganda (multiple regression analysis)*. Analisis data dilakukan dengan menguji secara statistik variabel-variabel bebas dengan variabel terikat dengan perangkat lunak. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji variabel independent yaitu

Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Kebutuhan hidup layak Terhadap variabel dependent yaitu Upah Minimum Provinsi.

Persamaan regresi linier berganda secara umum adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Dimana:

- Y = Upah Minimum Provinsi
- $\beta_1\beta_2\beta_3$  = Koefesien Regresi
- X1 = Pertumbuhan Ekonomi
- X2 = Inflasi
- X3 = Kebutuhan Hidup Layak
- e = Error Term

Untuk kebenaran hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji statistik t (*uji parsial* ) dan uji statistik f (*uji simultan* ), dengan tingkat keyakinan sebesar 95 % atau (  $\alpha$  ) = 0,05 d.f = n-k-1.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Analisis Deskriptif

**Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif**

Variabel	Y	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>
Mean	1717682.	488.9500	497.9000	1634163.
Maximum	2747561.	737.0000	960.0000	2254000.
Minimum	741000.0	-120.0000	171.0000	866250.0
Std.Dev	578168.6	199.5491	193.2841	404621.3
Observation	40	40	40	40

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa statistik deskriptif dengan jumlah data sebanyak 40 pengamatan didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dengan 4 sampel/objek penelitian dikalikan periode penelitian selama 10 tahun . Upah minimum provinsi (Y) memiliki nilai minimum sebesar 741000.0 dan nilai maximum 2747561, nilai meannya sebesar 1717682, serta nilai standar deviasi sebesar 578168.6.

Jumlah Pertumbuhan Ekonomi (X<sub>1</sub>) dari jumlah data sebesar 40 memiliki nilai minimum sebesar -120.0000 dan nilai maximum sebesar 737.0000, nilai meannya sebesar 488.9500, serta nilai standar deviasi sebesar 199.5491.

Jumlah Inflasi (X<sub>2</sub>) dari jumlah data 40 memiliki nilai minimum sebesar 171.0000 dan nilai maximum 960.0000

sebesar, nilai meannya sebesar 497.9000 serta nilai standar deviasi sebesar 193.2841.

Jumlah Kebutuhan Hidup Layak ( $X_3$ ) dari jumlah data sebesar 40 memiliki nilai minimum sebesar 866250.0 dan nilai maximum sebesar 2254000, nilai meannya sebesar 1634163 serta nilai standar deviasi sebesar 404621.3.

### Pemilihan Model Data Panel

Dalam regresi data panel terdapat tiga model yang dapat digunakan dalam regresi yaitu common effect model, fixed effect model, dan random effect model adapun untuk memilih model mana yang tepat untuk digunakan maka harus dilakukan pengujian terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan uji chow dan uji haustman . Hasil pemilihan model sebagai berikut :

#### 1. Uji Chow

*Chow Test* yakni pengujian untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah:

$H_0$  : *Common Effect Model* atau *pooled OLS*

$H_1$  : *Fixed Effect Model*

**Tabel 3. Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.525400	(3,33)	0.0035
Cross-section Chi-square	16.280134	3	0.0010

Berdasarkan tabel 3 diatas diperoleh nilai statistik dari hasil pengujian uji chow yaitu angka probabilitas Cross-Section F sebesar 0.0035 yang artinya nilai p value lebih kecil daripada  $\alpha = (0,05)$  5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari uji chow adalah menolak  $H_0$ , hingga lebih baik

menggunakan model *Fixed Effect* dari pada *Common Effect*.

#### 2. Uji Haustman

Uji haustman digunakan untuk membandingkan model *Fixed Effect* dengan *Random Effect*. Alasan dilakukannya uji mengandung suatu unsur *trade off* yaitu hilangnya unsur derajat bebas dengan memasukan variabel *dummy* dan model *Random Effect* yang harus memperhatikan ketiadaan pelanggaran asumsi dari setiap komponen galat. Dalam pengujian ini dilakukan hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  :  $\text{corr}(X_{it}, U_{it}) = 0$  (Model *Random Effect*)

$H_1$  :  $\text{corr}(X_{it}, U_{it}) \neq 0$  (Model *Fixed Effect*)

**Tabel 4. Uji Haustman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	16.576201	3	0.0009

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai statistik uji haustman yang diperoleh memiliki probabilitas sebesar 0.0009 lebih kecil dari  $\alpha = (0,05)$  5% dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dan ini artinya model estimasi yang paling tepat untuk penelitian yang dilakukan adalah *Fixed Effect*

#### Hasil Estimasi Fixed Effect model

Model yang terpilih dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model

$$Y_{it} = 1087350 - 600.3756 (X_1) - 1277.152 (X_2) + 0.954482 (X_3) + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

Y : Upah Minimum Provinsi

X1 : Pertumbuhan Ekonomi

X2 : Inflasi

X3 : Kebutuhan Hidup Layak

$\epsilon_{it}$  : Standar Error

1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan.

2. Inflasi berpengaruh negatif terhadap upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan.
3. Kebutuhan Hidup Layak berpengaruh positif terhadap upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan.

**Pengujian Statistika Analisis Regresi Uji Parsial (Uji-t)**

Uji t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel tak bebas secara parsial. Uji t-statistik biasanya berupa pengujian hipotesa (UPKFE,2011:14) :

H0 diterima bila t-statistik < t-tabel

H1 ditolak bila t-statistik > t-tabel

Rumus mencari t tabel yaitu :

$$\alpha/2 = 0.05 / 2$$

$$n = 40$$

$$k - 1 = 4 - 1$$

$$\text{Rumus } \alpha / 2 : n - k - 1$$

$$= 0.05 / 2 : 40 - 4 - 1$$

$$= 0.025 : 35 = (2.03011 \text{ nilai t tabel})$$

**Tabel 5. Uji Parsial (Uji-t)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1087350.	346304.6	3.139865	0.0036
X1	-600.3746	331.3032	<b>-1.812161</b>	0.0791
X2	-1277.152	222.9173	<b>-5.729263</b>	0.0000
X3	0.954482	0.120242	<b>7.938002</b>	0.0000

a. Pertumbuhan Ekonomi

Nilai pertumbuhan ekonomi (X1) dimana t.hitung ( - 1.812161) < t.tabel (2.03011). Sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya nilai pertumbuhan ekonomi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap upah minimum provinsi (Y) di Pulau Kalimantan. Di dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan, tetapi tidak membuat upah minimum turun , ada variabel lain yang mengakibatkan nilai upah minimum turun yaitu permintaan dan penawaran tenaga kerja, hal ini dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja yang tersedia.

Semakin banyak tenaga kerja dan melebihi permintaan, nilai upah akan menurun. Sedangkan jika jumlah tenaga kerja terlalu sedikit di bawah permintaan secara otomatis upah akan dinaikan.

b. Inflasi

Nilai inflasi (X2) dimana t.hitung ( - 5.729263) < t.tabel (2.03011). Sehingga H0 diterima dan Ha di tolak. Yang artinya nilai inflasi ( X2) berpengaruh negatif signifikan terhadap upah minimum provinsi (Y) di Pulau Kalimantan. Di dalam penelitian ini inflasi berpengaruh signifikan, tetapi tingkat inflasi tidak membuat upah minimum turun, ada variabel lain yang mengakibatkan nilai upah minimum turun yaitu peraturan pemerintah, biasanya pemerintah telah mengatur berapa jumlah minimal gaji yang bisa diterima oleh seorang pekerja dan setiap daerah memiliki nilai upah minimum regional.

c. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Nilai kebutuhan hidup layak (X3) t.hitung (7.938002) > t.tabel (2.03011). Sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya nilai kebutuhan hidup layak (X3) berpengaruh signifikan terhadap upah minimum provinsi ( Y) di Pulau Kalimantan. Apabila nilai kebutuhan hidup layak (X3) naik maka nilai upah minimum provinsi (Y) juga akan naik di Pulau Kalimantan.

Berdasarkan hasil regresi diatas dapat kita simpulkan bahwa variabel kebutuhan hidup layak memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dibandingkan alpha (0,05), maka dapat diketahui bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi Upah Minimum Provinsi yaitu variabel kebutuhan hidup layak (X3) di Pulau Kalimantan selama tahun 2010-2019 dan ini sesuai dengan hipotesis dari penelitian ini.

### Uji Simultan (Uji F)

Uji F-statistik ialah untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas secara keseluruhan (UPKFE,2011:15). Uji F-statistik biasanya berupa :

$H_0$  = tidak terdapat pengaruh secara simultan antara pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kebutuhan hidup layak

terhadap upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan

$H_1$  = terdapat pengaruh secara simultan antara pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kebutuhan hidup layak terhadap upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan

Rumus untuk mencari F tabel yaitu :

$$F \text{ tabel} = (k ; n - 1) = (4 ; 40 - 4) = (4 ; 36) = 2.63$$

**Tabel 6. Uji Simultan ( Uji F)**

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Weighted Statistics			
R-squared	0.857231	Mean dependent var	1771643.
Adjusted R-squared	0.831273	S.D. dependent var	664452.9
S.E. of regression	242633.6	Sum squared resid	1.94E+12
<b>F-statistic</b>	<b>33.02367</b>	Durbin-Watson stat	1.299766
<b>Prob(F-statistic)</b>	<b>0.000000</b>		

Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa F hitung (33.02367) > F tabel ( 2,63), maka kesimpulannya Pertumbuhan Ekonomi ( X1), Inflasi (X2), dan Kebutuhan Hidup Layak (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Upah Minimum Provinsi (Y) di Pulau Kalimantan.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan dari hasil yang ditunjukkan oleh tabel *Fixed Effect model* dapat diinterpretasikan mengenai besarnya pengaruh variabel independent (pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kebutuhan hidup layak) terhadap variabel dependen (Upah Minimum Provinsi) sebagai berikut :

**Tabel 7. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>R-square</b>	<b>0.857231</b>
-----------------	-----------------

Hasil perhitungan menyatakan bahwa dapat dijelaskan pengaruh dari variabel independen (pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebutuhan hidup layak ) terhadap variabel dependen (upah minimum provinsi) di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 0.857231 (85,7%),

sedangkan 15 % dipengaruhi variabel diluar model penelitian.

### V. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap upah minimum provinsi, pengaruh inflasi terhadap upah minimum provinsi dan pengaruh kebutuhan hidup layak terhadap upah minimum provinsi serta untuk mengetahui faktor yang paling dominan terhadap upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan pada tahun 2010-2019. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan tahun 2010-2019.
2. Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan tahun 2010-2019.
3. Kebutuhan hidup layak berpengaruh positif signifikan terhadap upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan tahun 2010-2019.
4. Kebutuhan hidup layak merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi upah minimum

provinsi di Pulau Kalimantan tahun 2010-2019

## V. REFERENSI

- Ahman, Eeng dan Epi Indriani (2017). *Membina Kompetensi Ekonomi*. PT Grafindo Media Pratama. Bandung
- Aji, Ahmad Mukri dan Syarifah Gustiawan Mukri. (2020). *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah*. CV Budi Utama. Yogyakarta
- Amiruddin, Wahono. (1987). *Parlementaria No 19 Th XXIX, 1997*. CV Aulia. Jakarta
- Anton Hermanto Gunawan. (1991). *Anggaran Pemerintah dan Inflasi Ekonomi*. Jakarta
- Al- Arif & Nur Rianto. (2011). *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Era Intermedia. Solo
- Arifin, Imamul. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. PT Grafindo Media Pratama. Bandung
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan (edisi 5)*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Arrista Trimaya (2014). Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. Vol 5 No 1
- Bank Indonesia. Laporan Perekonomian Provinsi di Indonesia. <https://www.bi.go.id> (Diakses 15 Juni 2021)
- Bachrun, Saifuddin (2012). *Desain Pengupahan untuk Perjanjian Kerja Bersama*. Jakarta: PPM. Jakarta
- Badan Pusat Statistik Indonesia. Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dan rata-rata Nasional per Tahun ( Dalam Rupiah) 1997-2016. <https://www.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (Seri 2010) Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita ( Ribu Rupiah), 2018-2020. <https://www.bps.go.id/>
- Basuki Tri Agus & Nano Prawoto. (2016). *Analisis Regresi dilengkapi Aplikasi Spss dan Eviews*. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Baltagi, Bagi. (2005). *Ekonometric Analysis Of Panel Data*, Thrid Edition. John Wiley & Sons. England
- Boediono. (1994). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta
- Boediono. (1995). *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi: Ekonomi Moneter*, BPFE UGM. Yogyakarta
- Boediono. (1986). *Ekonomi Makro*, BPFE UGM. Yogyakarta
- Caraka Eko Rezzy. (2017). *Spatial Data Panel*. Wade Group. Jawa Timur
- Charysa, N. N. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4).
- Dahruji. (2017). *Statistik*. Duta Media Pubhling. Pamekasan
- Djalil, Rizal (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah*, RMBooks. Jakarta
- Fahmi, Irham (2014). *Kewirausahaan*. Alfabeta. Bandung
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. (2017). Inflasi dan Indeks Harga Konsumen. <https://macroeconomicdashboard.feb.u-gm.ac.id> ( Diakses 3 September 2021)
- Firmansyah, Aziz Fakhri (2019, November, 03). Pengertian Sumber Informasi Beserta Jenis-Jenis dan Contohnya. <https://www.nesabamedia.com/pengertian-sumber-informasi/amp/> (Diakses 11 Februari 2021)
- Gajimu (2020). Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). <https://gajimu.com/gaji/gaji-minimum/komponen-khl#> (Diakses 10 Februari 2021)
- Gani Evy Savitri. (2015). *Sistem Perlindungan Upah di Indonesia*, Vol XI No.1
- Galih Prihandani Utomo. Penetapan Upah Minimum Provinsi Yang Berkeadilan Bagi Pekerja dan Pengusaha. <https://penetapan-upah-minimum->

- provinsi-yang-berkeadilan-bagi-pekerja-dan-pengusaha (Diakses 7 Mei 2021)
- Hantoro Murti Novianti Dkk. (2020). *Parliamentari Review Omnibus Law*. Penerbit Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol II No 1
- Hafidz Arfandi (2019 Juni 17). Menghitung Ulang Kebutuhan Hidup Layak. <https://menyoal-penentuan-upah-dalam-revisi-pp-no-78-tahun-2015/> (Diakses 19 April 2021)
- Herison. (2009). *Buku Ajar Ekonomi Makro*. Pekanbaru
- Herman, H. (2018). Pengaruh Upah Minimum Kota (Umk) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru (2009-2016). *Eko dan Bisnis: Riau Economic and Business Review*, 9(1), 20-24.
- Hermuningsih, Sri. (2012). *Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan Suku Bunga*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Ibrahim, Adzikra. Pengertian Dokumentasi. <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-dokumentasi/> (Diakses 11 Februari 2021)
- Kartika, Metasari dan Fara Diana. (2019). *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (SATIESP 2019)*
- Katalog BPS. *Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota*. Badan Pusat Statistik Indonesia
- Kiwi. (2019 November 13). Upah Kalbar Terendah se Kalimantan. <https://suarapemredkalbar.com> (Diakses 8 Juni 2021)
- Kuncoro Mudrajat. (2004). *Ekonomi Pembangunan: Teori Masalah Dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Kertonegoro, Sentanoe (1999). *Hubungan Industrial Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit) dan Pemerintah (Tripartit)*. Yayasan Tenaga Kerja Indonesia
- Laili (2020, Maret, 11). Apa Itu Kuantitatif ? yuk ketahui . <https://tambahpintar.com/pengertian-penelitian-kuantitatif>. (Diakses 31 Desember 2020)
- Lubis, C. A. B. E. (2014). Pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan pekerja dan pengeluaran pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Economia*, 10(2), 187-193.
- Mimbar Kekayaan ABRI September. (1995). (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Jakarta
- Maryati Sri Dkk. (2017). *Deskripsi Perencanaan Ketenagakerjaan*. Citra Harta Prima. Jakarta
- Muhammad Idris. Desember. (2020). 14 Daftar 3 Daerah dengan biaya hidup termahal di Indonesia. <https://money.kompas.com>. ( Diakses 8 Juni 2021 )
- Nanga, Muana (2001). *Makroekonomi: teori, masalah dan kebijakan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Nurachmad, Much. (2009). *Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon & Dana Pensiun Untuk Pegawai dan Perusahaan* Visi Media. Jakarta
- Payaman. (2005). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. LPFE-UI. Jakarta
- Patur Pangaribuan. Upah Minimum Yang Dicitakan. DE FACTO Vol.1, No 1
- Poltekkes.id (2020, November, 04). Definisi Operasional: Pengertian, cara membuat, contoh. <https://www.google.com.sg/amp/s/poltekkes.id/definisi-operasional/> (Diakses 6 Februari 2021)
- Prasetyo, Eko. (2018). *Teropong Indonesia Memahami Kondisi Aktual Perekonomian Indonesia*. Ihya Pubhling. Jakarta
- Purwanto. (2019). *Analisis Korelasi dan Regresi Linier dengan Spss 21*. StaiaPress. Magelang

- Putong, Iskandar. (2015). *Ekonomi Makro*. Buku & artikel karya Iskandar Putong. Palembang
- Putri, R. F. (2015). Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik. *Economics Development Analysis Journal*, 4(2), 175-181.
- Pratowa Snasta Devanto & Putu Mahardika Adi Saputra. (2011). *Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkeadilan: Tinjauan UUD 1945*, Vol 5 No 2
- Priyono & Zainuddin Ismail. (2012). *Teori Ekonomi*. Dharma Ilmu. Surabaya
- Rachim. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Andi Offset. Yogyakarta
- Rina Hayati (2019, Maret, 30). Pengertian hipotesis penelitian, jenis, manfaat, dan cara membuatnya <https://penelitianilmiah.com/hipotesis-penelitian/>. (Diakses 4 Desember 2020)
- Rizqi, Amalina Maulidyah. (2019). *Human Resources Development*. Deepublish ; CV Budi utama . Yogyakarta
- Royda, R., & Seto, A. A. (2018). Pengaruh Upah Terhadap Produktifitas dan Inflasi Pada Sektor Industri Manufaktur di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 9(1), 15-20.
- Ruky, S., Achmad. (2006). *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Sari, A. K. (2013). Analisis pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan upah terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(02).
- Sari, R. (2013). Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(2), 131-145.
- Sanjaya, M.W Dkk. (2017). Pengaruh Pendalaman Finansial dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *Buletin studi ekonomi* 178-88
- Sekaran Uma & Roger Bougie. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis 1-Ed 6*. Salemba Empat. Bandung
- Soleh, Maimun (2005). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Andi Offsct. Yogyakarta
- Sulistiawati, Rini. (2012). *Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia*. Pontianak
- Sumarsono, Sony. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Sumarsono, Sony. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Sitorus, R.P, Santun. (2019). *Penataan Ruang*. PT Penerbit IPB Press. Bogor
- Sukirno, Sadono. (2012). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali Pers. Jakarta
- Sulemah, Rahman, Abdul dkk. (2020). *Ekonomi Makro*. Yayasan Kita Menulis. Medan
- Suryahadi Dkk. (2003). *Minimum Wage Policy and Its Impact On Employment In the Urban Formal Sector*. Bulletin Of Indonesia Economic Studies, Vol 39 No 1
- Syarifa Mahila (2014). *Kebutuhan Hidup Layak Dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Upah Minimum Provinsi Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan*. Vol.14. No 2 Tahun 2014
- Syiti Romalla (2019 November 22). *Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2019*. <https://komponen-kebutuhan-hidup-layak-khl-2019/amp/> (Di akses 19 April 2021)
- Tiawon, H., & Hukom, A. (2020). Analisis Kapasitas Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kalimantan

- Tengah. *Journal of Environment and Management*, 1(1), 40-45.
- Tjajandraningsih, Indrasari. dan Rina Herawati. (2009). *Menuju Upah Layak Oktober 2019*. Direktur perwakilan kantor FES Indonesia. Jakarta
- Todaro, Michael P (1994). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga. Makasar
- Unit Pengembangan Fakultas Ekonomika Universitas di Ponegoro. 2011. *Modul Eviews 6*. Semarang
- Wijayanto, Dian. (2013). *Pengantar Manajemen*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Widarjono, Agus. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta Eko. Yogyakarta
- Yasin Hasbi & Rezzy E. Caraka. (2017). *Spatial Data Panel*. Wade Group. Ponorogo
- Yunita, I., & Sirait, T. (2019). Penerapan Sar Pada Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Pulau Kalimantan Tahun 2017. In *Seminar Nasional Official Statistics* (Vol. 2019, No. 1, pp. 396-406).
- Zamroni, M (2009). *Buku Kantong Ekonomi SMA IPS*. Pustaka Widyatama. Yogyakarta